

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara rawan banjir dengan peringkat tinggi di dunia salah satu provinsi yang memiliki kategori tinggi rawan banjir adalah Ibu kota Jakarta. DKI Jakarta memiliki sejarah rawan banjir yang sangat tinggi. Sejarah banjir tercatat terjadi sejak tahun 1619, awal dari berdirinya kota Jakarta pada zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini bencana banjir di Jakarta masih berlangsung. Empat puluh persen atau sekitar 24.000 ha dari seluruh wilayah DKI Jakarta adalah dataran yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Dataran yang rendah ini dialiri oleh tiga belas sungai yang bermuara di Laut Jawa.

Banjir di Kota Jakarta berkaitan erat dengan banyak faktor seperti, antara lain, pembangunan fisik di kawasan tangkapan air di hulu yang kurang tertata baik, urbanisasi yang terus meningkat, perkembangan ekonomi dan perubahan iklim global. Menurut data Pemprov DKI, sepanjang tujuh tahun terakhir, berdasarkan data daerah yang terkena dampak, ketinggian air, durasi genangan dan jumlah korban kondisi bencana banjir di Ibu Kota masih tercatat fluktuatif. Keberadaan 13 Aliran sungai yang melintasi Kota Jakarta yaitu sungai Ciliwung, sungai Angke, sungai Pesanggrahan, sungai Grogol, sungai Krukut, sungai Baru Barat, sungai Mookevert, sungai Baru Timur, sungai Cipinang, sungai Sunter, sungai Buaran, sungai Jati Kramat, dan sungai Cakung ini menjadi sebab atas sering terjadinya bencana banjir karena kendala normalisasi sungai yang belum tuntas. Curah hujan tinggi, kurangnya resapan air, eksploitasi tanah yang berlebihan dan kebiasaan membuang sampah sembarangan juga menjadi penyebab besar terjadinya bencana banjir di Ibu Kota Jakarta terus berulang. Kurangnya kapasitas saluran dan tangkapan air mulai dari sungai, waduk, kanal banjir, drainase dan ruang terbuka hijau untuk menampung volume air yang berlebih akibat

curah hujan yang tinggi mengakibatkan aliran tangkapan air seperti sungai mengalami pendangkalan dan aliran air dari hulu tidak dapat terbuang ke laut.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Pada 2014, banjir terbesar terjadi pada bulan Januari dan Februari. Dampak tertinggi tercatat mengalami luapan air antara 10 hingga 400 cm merendam setidaknya 634 RW 125 kelurahan dari 37 kecamatan, mengakibatkan setidaknya 122.417 warga mengungsi di 434 titik dan 23 orang meninggal dunia. Banjir yang menggenangi sejumlah daerah di Ibu Kota itu baru surut setelah 20 hari. Pada 2015, data banjir terbesar terjadi pada bulan Februari. Setidaknya ada 615 RW di 133 kelurahan dari 38 kecamatan terendam banjir. Rata-rata ketinggian air mencapai sekitar 10-200 cm dengan lama genangan hingga tujuh hari. Setidaknya 41.202 orang mengungsi di 337 titik dan lima orang menjadi korban meninggal dunia dalam banjir. Pada 2016, banjir terbesar terjadi pada bulan April dengan lama genangan air terhitung dua hari dan ketinggian antara 5 hingga 360 cm. Setidaknya 134 RW di 44 kelurahan dari 18 kecamatan. Sementara 20.945 orang mengungsi di 40 titik dan tercatat tidak ada korban meninggal. Pada 2017, data dampak tertinggi tercatat pada bulan Februari dengan lama genangan lima hari dan ketinggian air antara 10 hingga 250 cm. BMKG saat itu mencatat curah hujan tertinggi 179,7 mm/hari. Setidaknya 216 RW di 67 kelurahan dari 31 kecamatan terendam banjir. Sebanyak 5.858 jiwa mengungsi di 45 titik dan enam orang meninggal selama bencana. Pada 2018 kondisi banjir tetap terjadi dengan dampak terbesar pada bulan Februari dengan luapan air menggenangi sejumlah daerah di Jakarta antara satu hingga 6 hari. Sebanyak 162 RW di 43 kelurahan dari 24 kecamatan tergenang banjir dengan ketinggian air rata-rata 5 hingga 300 cm. Sebanyak 15.558 orang mengungsi di 60 titik dan satu orang meninggal dunia. Pada 2019 dampak terbesar tercatat pada bulan Maret dengan 119 RW tergenang banjir. Ketinggian air rata-rata antara 10-100 cm dengan lama genangan banjir sekitar 2 hari. pada 2019 ini tercatat 1.010 orang dari 315 kepala keluarga warga mengungsi dan nihil korban jiwa. Pada pembukaan tahun 2020, banjir kembali menyapa daerah di DKI Jakarta dengan dampak ratusan wilayah yang

tergenang hingga 350 cm, sebanyak 390 RW di 151 kelurahan dari 35 kecamatan Jakarta terendam banjir dengan durasi empat hari. DKI mencatat, ada 36.445 warga yang mengungsi di 269 titik dan 19 orang meninggal selama banjir. Banjir kembali terjadi pada Februari 2020, jumlah lokasi yang terendam bertambah menjadi 581 RW di 167 kelurahan dari 42 kecamatan, tetapi genangan berangsur surut dalam satu atau dua hari. Ketinggian air saat itu antara 5 sampai 200 cm. Banjir tersebut membuat 43.464 jiwa terdampak. Sebanyak 13.808 orang mengungsi di 119 lokasi titik dan enam orang meninggal akibat banjir pada periode tersebut. Pada tahun 2021, banjir terjadi pada bulan Februari Pemprov DKI mencatat mengalami penurunan dengan hanya 4 km persegi wilayah yang tergenang dan hanya 113 RW yang terendam. Jumlah pengungsi akibat banjir di tahun ini juga turun drastis, yakni hanya 3.311 orang dan korban jiwa akibat banjir tahun ini mencatat korban lebih sedikit, yaitu 5 orang. Tahun ini juga menjadi tahun dengan waktu genangan banjir surut paling cepat yaitu surut dalam waktu 1 hari saja.

Sampai saat ini masalah bencana banjir di Jakarta masih belum terpecahkan dan belum membaik. Sebagai Ibu Kota yang menjadi daerah panutan seharusnya permasalahan bencana banjir di Jakarta mengalami penurunan atau kalau mungkin hilang. Karena status maju kota Jakarta akan menjadi contoh untuk daerah atau provinsi lainnya. Dampak kerugian dan risiko akan sangat besar yaitu masalah kesehatan, kerugian ekonomi, sulitnya air bersih, terhambatnya aktivitas hingga korban jiwa. Sudah banyak dilaksanakannya berbagai upaya, rencana dan program untuk mengurangi risiko banjir bencana di Jakarta, namun hanya sedikit dari rencana tersebut yang terlaksana dan hasilnya belum maksimal.

Risiko banjir di DKI Jakarta dapat dikurangi melalui kerjasama antar *stakeholder* terkait. Permasalahannya adalah belum ada analisis yang meneliti siapa saja sebenarnya *stakeholders* dan juga tugas pokok dan fungsi perannya masing – masing dari setiap *stakeholder* yang terlibat dalam pengurangan risiko banjir di Jakarta. Risiko banjir harus dikurangi karena risiko yang tinggi berpengaruh pada pertumbuhan

ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah dan *stakeholder* terkait harus secara bersama sama mewujudkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dapat dicapai melalui kondisi wilayah dan masyarakat yang kondusif. Salah satu kondisi wilayah dan masyarakat yang kondusif adalah kemampuan masyarakat mengatasi bencana banjir. Pengurangan risiko banjir harus dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Walau bagaimanapun, pengendalian banjir tetap tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi membutuhkan Pemerintah Pusat dan juga Provinsi lainnya untuk lebih konsisten dalam mengembangkan sarana pengendali banjir. Kerjasama antara berbagai stakeholder penting guna mengendalikan banjir di Ibukota Indonesia (Mirah Sakethi, 2010) Peran serta seluruh unsur stakeholder dalam penanggulangan bencana banjir mempunyai peran dan kapasitas yang sangat penting agar kebencanaan dapat tertangani dengan baik. Menurut BNPB (2019) penanggulangan bencana bukanlah tanggung jawab individu atau suatu instansi melainkan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan peran *stakeholder*. Mitigasi yang kprehensif perlu adanya peran *stakeholder* dalam penanganannya, karena tanpa peran stakeholder maka penanggulangan bencana banjir tidak akan berjalan dengan baik. *Stakeholder* merupakan pemangku kepentingan yang berperan dalam pengambilan keputusan serta memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi individu, kelompok maupun organisasi.

Menurut Budimanta dkk, (2008) dalam Sukirno (2017) *Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan, Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik yang mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Peran *stakeholder* dalam manajemen

bencana banjir telah diatur dalam pembagian Tanggung Jawab Manajemen Bencana pada UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB (Badan Nasional, Penanggulangan Bencana Nasional) lembaga swasta, dan lembaga internasional, Instansi/institusi yang memiliki tugas, fungsi, dan perannya masing-masing sesuai peraturan yang telah ditetapkan untuk bertanggung jawab dalam mitigasi bencana banjir secara fisik maupun non fisik.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengurangan risiko banjir di Provinsi DKI Jakarta?
2. Siapa dan bagaimana peran stakeholders dalam pengurangan risiko banjir di Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana analisis stakeholder dalam pengurangan risiko banjir di Provinsi DKI Jakarta?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis peran stakeholder dalam pengurangan risiko banjir di Provinsi DKI Jakarta dengan analisis data menggunakan program MACTOR (*Matrix of Alliances and Conflicts, Tactics, Objective, and Recommendations*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis stakeholder dalam pengurangan risiko banjir di Provinsi DKI Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial dan humaniora terkait penerapan *Key Elements Pengurangan Dampak Kerugian Bencana Banjir (Guidelines For Reducing Flood Losses)*.
- b. Sebagai referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang akan meneliti dalam bidang penelitian terutama yang membahas tentang bidang pengurangan risiko banjir.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti setelah melaksanakan penelitian terkait Analisis Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Banjir di Provinsi DKI Jakarta.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau rekomendasi yang bermanfaat dalam pembangunan, perencanaan daerah terkait perencanaan manajemen bencana khususnya bencana banjir.
- c. Bagi Masyarakat Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengurangan risiko banjir kepada masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta.